

DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP USAHA TANI BERAS ORGANIK DI PROVINSI JAWA BARAT

The Impacts of Government Policy towards Organic Rice Farming in West Java

Ulpah Jakiyah¹, Lukman M Baga², Netti Tinaprilla²

¹Program Studi Magister Sains Agribisnis, Sekolah Pascasarjana IPB

²Departemen Ekonomi, Institut Pertanian Bogor

Jl. Kamper, Wing 4 Level 5 Kampus IPB Dramaga, Bogor, Indonesia 16680

e-mail: ulpahjaki89@gmail.com

Naskah diterima: 12/08/2015 Naskah direvisi: 01/12/2015 Disetujui diterbitkan: 24/02/2016

Abstrak

Salah satu kebijakan Menteri Pertanian berkenaan dengan ekspor dan impor beras adalah peningkatan ekspor jenis beras khusus, seperti beras organik. Permintaan pasar global beras organik semakin meningkat, tetapi Indonesia menghadapi pesaing seperti Thailand dan Vietnam. Meskipun demikian, petani beras organik di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemampuan daya saingnya dengan keberhasilannya melakukan ekspor ke Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Singapura, Belanda, Italia, dan Uni Emirate Arab (Dubai). Penelitian ini bertujuan menganalisis daya saing beras organik, dan mengidentifikasi dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usaha tani beras organik. Metode analisis yang digunakan adalah *Policy Analysis Matrix* (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas beras organik memiliki daya saing yang cukup untuk ekspor, terlihat pada keunggulan kompetitif (*Private Cost Ratio*) dan komparatif (*Domestic Resource Cost Ratio*). Penerimaan secara finansial maupun sosial dapat memenuhi biaya input domestik. Keunggulan kompetitif dan komparatif melemah akibat dari adanya pengaruh biaya sertifikasi lahan pada biaya domestik dan biaya kemasan, sedangkan dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output menguntungkan petani. Kebijakan bersifat efektif namun belum efisien akibat belum adanya lembaga penyediaan input seperti pupuk dan benih organik.

Kata kunci : Keunggulan Kompetitif, Keunggulan Komparatif, Beras Organik, Kebijakan Pemerintah, *Policy Analysis Matrix*

Abstract

One of the agriculture minister policies related to rice exports and imports is the increased number of certain type of rice export such as organic rice. The global demand of organic rice market has been increasing but Indonesia is facing competitors, such as Thailand and Vietnam. Nevertheless, organic rice farmers in west java province are showing their competitive capability by exporting to a United States, Germany, Malaysia, Singapore, The netherlands, Italy, and Uni Emirate Arab (Dubai). This study aims to analyze the competitiveness of organic rice, and identify the impacts in government policy for the organic rice farming. The result shows that some varieties of organic rice have adequate export competitiveness, seen from the competitive advantage (private cost ratio) and the comparative advantage (domestic cost ratio) which are positive. The analysis method used was Policy Analysis Matrix (PAM). The financial and social revenue could cover the input of domestic cost. The competitive and comparative advantages were weakened as a result of the influence of land certification in the domestic and packaging cost, whereas the impact of government policy to input and output is profitable for farmers. The policy is effective but has not been efficient due to lack of input providers such as fertilizer and organic seeds.

Keywords: *Competitive Advantage, Comparative Advantage, Organic Rice, Government Policy, Policy Analysis Matrix*

JEL Classification: Q17, Q18, Q28

PENDAHULUAN

Keputusan pemerintah Indonesia untuk masuk ke pasar bebas menuntut pemerintah meningkatkan berbagai potensi ekspor Indonesia, termasuk diantaranya potensi dari sektor pertanian. Pertumbuhan ekspor Indonesia terhadap pertanian dinilai paling konsisten ditinjau dari luas areal lahan dan tingkat produksi (Kaunang, 2013). Lahan pertanian yang sangat luas dan jumlah petani yang besar merupakan potensi bagi Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara lain, termasuk juga pertanian organik. Untuk itu, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah hendaknya dapat mendukung dan melindungi petani beras organik dalam negeri.

Perkembangan luas areal pertanian organik Indonesia dari tahun 2010-2013 mengalami tren meningkat (BPS, 2014). Walaupun pada tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan dari 88.247 Ha menjadi 65.688 Ha namun dapat dikendalikan dengan semakin banyaknya petani yang berminat melakukan usaha tani organik (IFOAM, 2014). Berdasarkan data dari IFOAM (2014), tahun 2013 luas areal pertanian organik Indonesia telah menyumbang 0.1% share lahan pertanian organik dunia. Penurunan luas lahan pertanian organik tersebut dikarenakan adanya kebijakan sertifikasi dan penyesuaian lahan organik. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap produksi dan daya saing usaha tani pertanian organik baik di pasar domestik maupun pasar internasional (Willer, 2010).

Permintaan pasar mengenai pertanian organik mencapai 72 miliar USD (IFOAM, 2014). Salah satunya permintaan luar negeri terhadap beras organik mencapai 100 ribu ton pertahun. Sedangkan Indonesia hanya mampu mengekspor 9 ribu ton per musim tanam, atau kurang dari 10% dari kebutuhan pasar global. Sebagai pengekskor beras organik, Indonesia masih tertinggal jauh dengan Thailand dan Vietnam, yakni dua negara tetangga Indonesia yang ditetapkan oleh IFOAM sebagai pengekskor utama dunia beras organik dunia Thailand dan Vietnam lebih dahulu melihat potensi pasar produk pertanian organik, sehingga strategi pengembangan produksi ataupun aturan-aturan terkait dengan produk beras organik telah lebih maju.

Peluang pasar organik dimanfaatkan oleh petani di Provinsi Jawa Barat, khususnya petani Kabupaten Tasikmalaya. Mereka berhasil melakukan budidaya serta ekspor beras organik ke Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Singapura, Malaysia, Italia, dan Uni Emirate Arab (Dubai). Tidak ada data statistik resmi jumlah produksi beras organik secara national namun perkiraan semakin meningkatnya potensi pasar dapat dilihat dari meningkatnya ekonomi, semakin peduli konsumen akan kesehatan, dan peduli terhadap lingkungan (Mayrowani, 2014). Data tentang jumlah produksi beras organik belum disusun dan dibukukan secara national oleh lembaga pertanian ataupun oleh BPS.

Kebijakan pemerintah daerah setempat mendukung kegiatan penanaman dan peningkatan produksi

beras organik Tasikmalaya. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya (2015), selama kurun waktu tahun 2009 sampai 2014, ekspor beras organik daerah ini mengalami tren meningkat. Tahun 2014 volume ekspor mencapai 93.875 Kg. Kegiatan pascapanen terpusat di Gapoktan Simpatik dan dijadikan sebagai wadah yang dapat menampung aspirasi dan meningkatkan *bargaining position* petani. Ekspor beras organik dilakukan melalui distributor PT Bloom Agro.

Potensi yang dimiliki usaha tani beras organik Kabupaten Tasikmalaya adalah jumlah petani dan luas lahan pertanian. Jumlah petani yang bersertifikasi organik semakin meningkat menjadi 465 orang. Begitu juga luas lahan petani beras organik meningkat pula, mencapai sekitar 360 Ha dengan sertifikasi internasional *Institute for Marketecology Organic* (IMO). Kegiatan pemasaran ekspor beras organik sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014. Kesesuaian input pertanian beras organik seperti penggunaan pupuk organik telah diatur dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR/11/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi. Sebagai daerah penghasil produk ekspor Kabupaten Tasikmalaya belum memenuhi kebutuhan pasar global dan domestik. Kebutuhan pasar global dan domestik beras organik mencapai 320 ton per musim tanam sedangkan daerah ini hanya mampu menghasilkan 31.4 ton per musim tanam.

Memanfaatkan peluang ekspor beras organik yang terus meningkat

merupakan komitmen Pemerintah Indonesia, dan ekspor beras organik Tasikmalaya merupakan kasus empiris menarik sebagai pembelajaran bagi pemerintah dalam usaha meningkatkan daya saing beras organik. Hubungan kausalitas yang terjadi antara ekspor produk beras organik Tasikmalaya dan kebijakan pemerintah setempat dengan demikian merupakan masukan penting untuk penyusunan kebijakan peningkatan ekspor beras organik Indonesia yang lebih menyeluruh. Penelitian dan pemahaman yang mendalam tentang hal tersebut jelas sangat relevan, dan perlu dilakukan sebagai usaha untuk mengetahui dampak dari suatu kebijakan terhadap usaha tani beras organik.

METODE

Perdagangan Internasional memberikan peluang bagi negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Krugman (2004) menjelaskan bahwa keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang mempunyai biaya pengorbanan (*opportunity cost*) terendah dibanding memproduksi barang lain. Sedangkan keunggulan kompetitif dapat diukur dari kelayakan finansial dari kegiatan usaha. Keunggulan kompetitif dihitung berdasarkan pada harga yang berlaku di pasar.

Kegiatan perdagangan ekspor beras organik tidak pernah lepas dari kebijakan pemerintah. Sehingga diperlukan metode analisis yang dapat mencakup konsep daya saing dan dampak kebijakan (Soetriono, 2010). Metode yang digunakan secara

menyeluruh bagaimana dampak kebijakan dan daya saing beras organik adalah *Policy Analysis Matrix* (PAM). PAM digunakan untuk menghitung keuntungan, baik keuntungan privat maupun keuntungan sosial. Analisis keuntungan privat pada PAM adalah selisih dari pendapatan privat dan biaya privat. Keuntungan privat merupakan keuntungan tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sedangkan analisis keuntungan sosial merupakan keuntungan dengan adanya campur tangan pemerintah.

Menurut Yadjid (2011), tujuan penggunaan PAM adalah untuk menganalisis efisiensi ekonomi dan besarnya intervensi pemerintah serta dampaknya terhadap kegiatan usaha tani beras organik. Analisis daya saing komparatif didapatkan dengan perhitungan Rasio Sumberdaya Domestik (DRC), sedangkan keunggulan kompetitif dapat dihitung menggunakan perhitungan Rasio Biaya Privat (PCR).

Hasil analisis PAM dapat menunjukkan pengaruh individual maupun kolektif dari kebijakan harga dan kebijakan faktor domestik. PAM juga memberikan informasi dasar yang penting bagi *benefit-cost analysis* untuk kegiatan investasi di bidang pertanian. Selain itu, PAM digunakan untuk menganalisis kebijakan mengenai penerimaan secara konsisten dan menyeluruh biaya usaha tani, tingkat perbedaan pasar, sistem pertanian, investasi pertanian, dan efisiensi ekonomi.

Penelitian tentang beras organik di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan pada Bulan Februari 2015 sampai bulan

April 2015. Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Gapoktan, petani atau anggota kelompok tani, dan penyuluh pertanian setempat. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, IFOAM, dan FAO melalui jaringan internet. Petani responden di masing-masing lokasi dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria pemilik dan penggarap yang telah memperoleh sertifikasi organik dari IMO dan Sucofindo. Petani yang menjadi responden berjumlah 25 orang, masing-masing 5 orang dari 5 kelompok tani yang menghasilkan jenis beras organik yang berbeda.

Penelitian analisis daya saing pada usaha tani beras organik di Gapoktan Simpatik menggunakan metode PAM yang dikembangkan oleh Monke & Pearson (1989). Sebagaimana yang dilakukan oleh Yadjid (2011) dalam penelitian mengenai daya saing usaha tani Tebu. Tahapan dalam menganalisis metode PAM sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi seluruh input yang digunakan dalam proses produksi.
2. Mengalokasikan input tradable dan input non tradable.
3. Menghitung harga bayangan input, output, dan nilai tukar uang.
4. Menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif dengan metode PAM.

Input usaha tani beras organik adalah benih beras organik, pupuk, lahan, dan tenaga kerja. Lahan dalam penelitian ini membutuhkan sertifikasi

lahan organik sehingga adanya biaya tambahan yaitu biaya sertifikasi. Sedangkan output dalam usaha tani ini adalah beras organik. Tahapan dalam mengidentifikasi input dan output usaha tani beras organik antara lain:

Penentuan harga bayangan dan harga pasar

Setiap input dan output pada penelitian ini ditetapkan dua tingkat harga, yaitu harga bayangan dan harga pasar. Harga pasar adalah tingkat harga pasar yang diterima pengusaha dalam penjualan hasil produksinya atau tingkat harga yang dibayar dalam pembelian faktor pembelian. Menurut Gittinger (1986), harga bayangan merupakan harga yang terjadi dalam perekonomian pada keadaan persaingan sempurna dan kondisi keseimbangan. Biaya imbalan sama dengan harga pasar sulit ditemukan, maka untuk memperoleh nilai yang mendekati biaya imbalan ini dilakukan dengan penyesuaian terhadap pasar yang berlaku. Penelitian ini menggunakan komoditi yang diperdagangkan, dan akan didekati dengan harga batas (*border price*). Komoditas beras organik selama ini diekspor, dan karena itu digunakan harga *Free On Board* (FOB).

Harga Bayangan Nilai Mata Uang

Harga bayangan nilai mata uang adalah harga uang domestik dalam kaitannya dengan mata uang asing

yang terjadi pada pasar nilai tukar uang pada kondisi bersaing sempurna. Salah satu pendekatan untuk menghitung harga bayangan nilai tukar uang adalah harga bayangan harus berada pada tingkat keseimbangan nilai tukar uang. Keseimbangan terjadi apabila dalam pasar uang, semua pembatas dan subsidi terhadap ekspor dan impor dihilangkan. Keseimbangan nilai tukar uang dapat didekati dengan menggunakan *Standar Conversion Factor* (SCF) sebagai faktor koreksi terhadap nilai tukar resmi yang berlaku:

$$SER_t = \frac{OER_t}{SCF_t} \text{ dimana } SCF_t = \frac{X_t + M_t}{(X_t - TX_t) + (M_t + TM_t)}$$

Dimana:

SER_t = Nilai tukar bayangan tahun t (Rp/USD)

SCF_t = *standard conversion faktor* (faktor konversi standar) tahun t

X_t = nilai ekspor Indonesia tahun t (Rp)

M_t = nilai impor Indonesia tahun t (Rp)

TM_t = pajak impor dan bea masuk tahun t (Rp)

Metode Analisis PAM

Model PAM digunakan untuk menganalisis daya saing dan dampak kebijakan dengan formulasi Tabel 1.

Tabel 1. Policy Analisis Matrix

Keterangan	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Input Tradable	Input Non Tradable	
Harga privat	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Efek Divergensi	I	J	K	L

Sumber : Monke & Pearson (1989)

Keterangan:

A : Penerimaan Privat
 B : Biaya input *Tradable* Privat
 C : Biaya input *non tradable* Privat
 D : Keuntungan Privat
 E : Penerimaan Sosial
 F : Biaya input *tradable* Sosial

G : Biaya Input *non tradable* Sosial
 H : Keuntungan Sosial
 I : Transfer Output
 J : Transfer input *Tradable*
 K : Transfer Faktor
 L : Transfer bersih

Analisis terpenting dalam matriks PAM dilihat dari ukuran keuntungan dan transfer bersih (*net transfer*) (Asmara, 2008). Sebelum menganalisis PAM menguraikan terlebih dahulu komponen pendapatan maupun biaya sehingga memungkinkan untuk mengukur *output transfer*, *input transfer*, dan *factor domestic transfer* (Tabel 1). Analisis PAM bisa digunakan untuk sistem komoditas individual yang berbeda, jenis usaha tani, dan teknologi (Salim, 2014). Tabel 1 memperlihatkan bentuk Tabel (matrix) PAM. Baris pertama didasarkan pada harga privat. Nilai-nilai pada baris ini menggunakan data harga yang benar-benar diterima atau dibayar oleh petani (harga actual) atau oleh pelaku agribisnis lainnya. Keuntungan privat mengukur daya saing, yakni insentif bagi petani untuk memproduksi suatu komoditas. Baris kedua, berisi nilai-nilai yang didasarkan pada estimasi pendapatan dan biaya sosial. Nilai-nilai ini didasarkan pada harga paritas untuk barang-barang tradable dan *opportunity*

cost untuk sumberdaya domestik. Kolom keuntungan memberikan nilai untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dan menunjukkan apakah sebuah komoditas memiliki keunggulan komparatif. Pada baris ketiga, setiap kolom berisikan selisih antara nilai-nilai yang dihitung berdasarkan harga privat (baris pertama) dengan nilai-nilai yang dihitung menggunakan harga sosial (baris kedua). Bila kegagalan pasar pengaruhnya tidak besar, maka selisih tersebut disebabkan oleh intervensi kebijakan pemerintah. Intervensi kebijakan ini merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Beberapa Indikator Hasil Analisis dari Matriks PAM adalah :

1. Analisis Keuntungan
 - a. *Private Provitability* / Keuntungan Privat (KP) : $D = A - (B+C)$
 Apabila $D > 0$, berarti sistem komoditi memperoleh profit atas biaya normal yang mempunyai implikasi bahwa komoditi itu mampu ekspansi, kecuali apabila

sumberdaya terbatas atau adanya komoditi alternatif yang lebih menguntungkan.

b. *Sosial Profitability/Keuntungan Sosial (KS)* : $H = E - (F+G)$

Keuntungan sosial merupakan indikator keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dari sistem komoditi pada kondisi tidak ada divergensi baik akibat kebijakan pemerintah maupun distorsi pasar.

2. Keunggulan Kompetitif dan Komparatif

a. *Private Cost Ratio (PCR)* = $C / (A-B)$: rasio ini menunjukkan berapa banyak sistem produksi usaha tani beras organik dapat menghasilkan untuk membayar semua faktor domestik yang digunakannya, dan tetap dalam kondisi kompetitif. Jika $PCR < 1$, berarti sistem komoditi yang diteliti memiliki keunggulan kompetitif dan sebaliknya jika $PCR > 1$, berarti sistem komoditi tidak memiliki keunggulan kompetitif.

b. *Domestik Resource Cost Ratio (DRCR)* = $G / (E-F)$: merupakan salah satu kriteria kemampuan usaha tani dalam membiayai faktor domestik pada harga sosialnya atau kriteria dari efisiensi ekonomi relatif dari suatu sistem produksi. Sistem mempunyai keunggulan komparatif jika $DRC < 1$ artinya sistem produksi usaha tani beras organik makin efisien dan memiliki daya saing di pasar dunia sehingga memiliki peluang ekspor yang cukup besar, dan sebaliknya jika $DRC > 1$

berarti sistem produksi tersebut tidak mempunyai keunggulan komparatif dengan tidak mampu bertahan tanpa subsidi pemerintah, sehingga lebih baik melakukan impor daripada memproduksi sendiri.

3. Dampak Kebijakan Pemerintah

a. *Kebijakan Output*

1) *Output Transfer* : $OT = A - E$: Jika nilai $OT > 0$ menunjukkan adanya transfer dari masyarakat (konsumen) terhadap produsen artinya produsen akan menerima harga jual yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya sehingga konsumen dirugikan. Sedangkan jika $OT < 0$ maka konsumen menerima intensif dari produsen dan dalam hal ini petani atau produsen dirugikan.

2) *Nominal Protection Coefficient on Output (NPCO)* = A/E : NPCO menunjukkan besarnya dampak kebijakan pemerintah yang mengakibatkan divergensi antara harga privat dan harga sosial. Kebijakan bersifat protektif terhadap output jika nilai NPCO > 1 yang artinya petani beras organik menerima subsidi atas output di pasar domestik di atas harga efisiensinya, dan sebaliknya kebijakan bersifat disinsentif jika NPCO < 1 yang artinya terjadi pengurangan penerimaan petani akibat kebijakan output seperti pajak.

b. *Kebijakan Input*

1) *Transfer Input* : $IT = B - F$: Jika nilai $IT > 0$, menunjukkan adanya

transfer dari petani produsen kepada produsen *input tradable*, demikian juga sebaliknya.

2) *Nominal protection Coefficient on Input* (NPCI) = B/F : Kebijakan bersifat protektif terhadap input jika nilai NPCI < 1 , berarti ada kebijakan subsidi terhadap *input tradable*, demikian juga sebaliknya.

3) *Transfer Faktor* : $FT = C - G$: Nilai $FT > 0$, mengandung arti bahwa ada transfer dari petani produsen kepada produsen input non tradable, demikian juga sebaliknya.

c. *Kebijakan Input-Output*

1) *Effective Protection Coefficient* (EPC) = $(A-B)/(E-F)$: Kebijakan masih bersifat protektif jika nilai $EPC > 1$. Semakin besar nilai EPC berarti semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap komoditi pertanian domestik.

2) *Net Transfer*: $NT = D - H$: Nilai $NT > 0$, menunjukkan tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input dan output, demikian juga sebaliknya.

3) *Profitability Coefficient* : $PC = D/H$: Jika $PC > 0$, berarti secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen, demikian juga sebaliknya.

4) *Subsidy Ratio to Producer* (SRP) = $L/E = (D-H)/E$: yaitu indikator yang menunjukkan proporsi penerimaan pada harga sosial

yang diperlukan apabila subsidi atau pajak digunakan sebagai pengganti kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah terhadap Output dan Input

Kebijakan pemerintah diberlakukan terhadap input dan output sehingga terjadi perbedaan antara harga input dan output yang diminta produsen (harga privat) dengan harga yang sebenarnya terjadi jika dalam keadaan perdagangan bebas (harga sosial). Beras organik merupakan komoditas ekspor maka kebijakan pemerintah terhadap output dan input sangat berpengaruh. Kebijakan harga output dan input dibedakan menjadi tiga tipe kriteria yaitu tipe instrumen (subsidi atau perdagangan), penerimaan atau keuntungan yang akan diperoleh (produsen dan konsumen), dan tipe komoditi (ekspor atau impor). Implementasi dan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk memanfaatkan peluang ekspor suatu komoditi dan kemajuan negara tersebut melindungi produsen atau konsumen dalam negeri.

Menurut Monke & Pearson (1989) kebijakan harga output dan input adalah kebijakan subsidi dan kebijakan perdagangan dalam negeri. Kebijakan subsidi dapat berupa subsidi positif yaitu subsidi yang diberikan oleh pemerintah dan subsidi negatif adalah subsidi yang dibayarkan kepada pemerintah berupa pajak. Subsidi positif dan negatif bertujuan untuk membedakan

antara harga domestik dan harga dunia dalam rangka melindungi produsen dan konsumen dalam negeri. Kebijakan perdagangan yang dapat diterapkan pemerintah berupa harga komoditi yang diperdagangkan (tarif) atau dengan membatasi jumlah komoditi yang di impor (kuota). Kegiatan usaha tani beras organik menggunakan input yang bersifat *tradable* dan *non tradable*. Kebijakan pemerintah terhadap input *non tradable* berupa hambatan perdagangan yang tidak tampak karena input tersebut hanya diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri.

Kebijakan yang ada terhadap input dan output beras organik selama ini antara lain 1) Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang ketentuan umum pertanian organik dari hulu sampai hilir; 2) Permentan Nomor 51/Permentan/HK.130/4/2014 tentang rekomendasi ekspor impor beras tertentu lebih kepada persyaratan bagaimana melakukan perdagangan produk organik; 3) Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang ketentuan ekspor impor beras untuk mengesahkan Permentan no 51; 4) Permentan Nomor 130/Permentan/SR/11/2015 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi salah satunya pupuk organik. HET untuk pupuk organik ditetapkan pemerintah sebesar Rp 500 per kg untuk pembelian oleh petani atau kelompok tani di lini IV secara tunai dalam kemasan 40 kg; 5) Menteri Pertanian nomor 70/Permentan/SR.140/2011 tentang pupuk organik, pupuk hayati dan pembenahan tanah. Peraturan ini dimaksudkan

sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan, pendaftaran, peredaran, penggunaan dan pengawasan pupuk organik

Implikasi Kebijakan Pemerintah terhadap Usaha tani Beras Organik

Kebijakan pemerintah mengenai pertanian organik telah ditetapkan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir. Permendag nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 mengenai ketentuan ekspor beras mengharuskan sebuah perusahaan telah memiliki persyaratan badan usaha dan bongkar muat di pelabuhan. Sedangkan pemasaran petani di Kabupaten Tasikmalaya hanya mampu melakukan pemasaran ditempat dikarenakan tingginya biaya angkut ke pelabuhan. Sehingga alternatif dari adanya kebijakan tersebut adalah bekerjasama dengan PT Bloom Agro melalui kontrak kerjasama. PT Bloom Agro melakukan bongkar muat beras organik di gapoktan dan mengekspornya. Pemasaran ini menjadikan harga beras organik dan dengan adanya ekspor tersebut petani beras organik Tasikmalaya dapat meningkatkan pendapatan mereka, bahkan mencapai tiga kali lipat dari budidaya beras konvensional (Nafis, 2011).

Peraturan Menteri Pertanian nomor 70/Permentan/SR.140/2011 tentang penyediaan pupuk organik menetapkan penyaluran pupuk organik dilakukan oleh lembaga khusus yang bersertifikasi SNI dan Badan Sertifikasi Nasional (BSN). Akan tetapi lembaga khusus untuk itu

belum ada, sehingga gapoktan harus membuat pupuk organik sendiri, secara manual yang jumlahnya masih terbatas. Petani di Kabupaten merasa belum terbantu dengan adanya kebijakan tersebut. Penyediaan benih begitu juga masih sangat terbatas. Peraturan Menteri Pertanian nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 mengenai penggunaan benih organik belum secara khusus mencantumkan aturan pengadaan, pendaftaran, peredaran, pengawasan, dan perlindungan benih organik. Peraturan tersebut hanya sebatas memberikan persyaratan bagi petani untuk bertanam organik tanpa adanya penanganan dan sistem kelembagaan yang dapat menampung aspirasi bagi petani beras organik.

Kebijakan pemerintah sebaiknya dilakukan juga dalam pengaturan bergeraknya produk organik serta menyediakan informasi penting bagi petani seperti peluang pasar, menetapkan harga jual, dan proteksi terhadap peredaran organik palsu. Diperlukan juga kebijakan yang mengatur bagaimana subsidi terhadap pupuk benar-benar terdistribusi langsung kepada petani tanpa adanya perantara dari lembaga-lembaga lain yang akan memotong rantai pupuk organik. Implikasi kebijakan yang menyeluruh dari hulu sampai hilir akan membuat petani beras organik di Kabupaten

Tasikmalaya mampu mempertahankan kegiatan ekspor beras organik yang mereka hasilkan. Kesejahteraan rumah tangga tani dengan demikian dapat berlanjut.

Daya Saing dan Dampak Kebijakan Usaha tani Beras Organik

Hasil analisis daya saing komoditi beras organik, baik daya saing komparatif maupun kompetitif, dengan alat analisis *Policy Analysis Matrix* (PAM) menunjukkan bahwa nilai KP untuk beras merah organik adalah Rp 2.193.448.53,- per hektar per tanam, beras hitam organik memiliki nilai KP Rp 3.487.636.14,- per hektar per tanam, dan beras putih organik memiliki nilai Rp 2 035 150.90,- per hektar per tanam. Nilai keuntungan ketiga varietas beras organik bersifat positif, dan ini berarti bahwa pengusahaan ketiga varietas tersebut menguntungkan. Penerimaan yang diterima petani lebih tinggi dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Budidaya beras organik tidak menggunakan pupuk urea dan pestisida. Pertanian beras organik menggunakan pupuk kompos, pupuk yang dapat dihasilkan sendiri oleh petani sehingga tidak membutuhkan biaya tinggi. Selain itu harga jual beras organik lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya dapat terus mengembangkan pertanian beras organik.

Tabel 2. Nilai Keuntungan Privat (KP) dan *Privat Cost Ratio* (PCR) Pengusahaan Beras Organik Tahun 2015

No	Varietas Beras	KP (Rp/Ha)	PCR
1	Beras Merah Organik	2.193.448,53	0.86
2	Beras Hitam Organik	3.487.636,14	0.79
3	Beras Putih Organik	2.035.150,90	0.88

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Keunggulan kompetitif ketiga varietas beras organik juga terlihat dari nilai PCR nilai yang positif, yaitu beras merah 0.86, beras hitam 0.79, dan beras putih 0.88. Nilai PCR dari ketiga komoditas tersebut yang kurang dari satu berarti bahwa pengusahaan ketiga varietas beras organik tersebut efisien dan memiliki keunggulan kompetitif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan 1 unit nilai tambah pada usaha tani beras merah organik membutuhkan biaya input domestik sebesar 0.86 pada harga privat. Pada beras hitam organik membutuhkan biaya input domestik sebesar 0.79 satuan pada harga privat untuk 1 unit nilai tambah.

Begitu juga pada beras putih memiliki nilai 0.88 artinya untuk mendapatkan 1 unit nilai tambah membutuhkan biaya input domestik sebesar 0.88 satuan pada harga privat.

Meskipun demikian, ketiga jenis beras organik memiliki nilai hampir mendekati 1. Artinya, ketiga jenis beras organik yang dimaksud memiliki nilai keunggulan kompetitif yang rendah. Hal ini dipengaruhi oleh adanya biaya sertifikasi lahan, pengeluaran yang mempengaruhi biaya domestik dan biaya kemasan pada input asing. Semakin rendah nilai PCR menunjukkan semakin besar keunggulan kompetitif yang dimilikinya.

Tabel 3. Nilai Keuntungan Sosial (KS) dan DRC Pengusahaan Beras Organik di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015

No	Varietas Beras	KS (Rp/Ha)	DRC
1	Beras Merah Organik	5.235.773,89	0,66
2	Beras Hitam Organik	3.205.429,15	0,75
3	Beras Putih Organik	392.997,31	0,96

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Nilai Keuntungan Sosial (KS) beras merah organik Rp. 5.235.773.89,- per hektar per tanam, beras hitam organik memiliki nilai KS Rp. 3.205.429.15,- per

hektar per tanam, sedangkan beras putih Rp. 392.997.31,- per hektar per tanam. Ketiga jenis beras organik ini memiliki nilai positif yang berarti bahwa

tanpa adanya kebijakan apapun dari pemerintah, ketiga komoditas tersebut memberikan keuntungan. Bersifat positif dikarenakan penerimaan beras organik secara sosial dapat menutupi semua biaya baik domestik maupun asing. Nilai DRC pada beras merah organik menjelaskan bahwa untuk memproduksi beras merah organik di tempat penelitian membutuhkan biaya sumberdaya domestik sebesar 0,66 satuan terhadap biaya ekspor yang dibutuhkan. Nilai DRC pada beras hitam organik menunjukkan bahwa untuk memproduksi beras hitam organik di tempat penelitian membutuhkan biaya sumberdaya domestik sebesar 0,75 terhadap biaya ekspor yang dibutuhkan. Sedangkan untuk nilai DRC pada beras putih organik menunjukkan bahwa memproduksi beras putih organik membutuhkan biaya sumberdaya domestik sebesar 0,96 satuan. Nilai DRC ketiga varietas tersebut memiliki nilai kurang dari satu yang artinya ketiga varietas tersebut memiliki keunggulan komparatif. Sehingga ketiga komoditas tersebut memiliki peluang ekspor. Nilai dari ketiga beras organik hampir mendekati 1 artinya memiliki keunggulan kompetitif yang sangat rendah namun masih bisa diusahakan. Hal ini dikarenakan tingginya harga kemasan dan biaya sertifikasi lahan secara sosial pada usaha tani beras organik.

Memperbandingkan antara keuntungan privat dan sosial dari ketiga jenis beras organik menggambarkan bahwa keuntungan sosial lebih tinggi dari

keuntungan privat pada beras hitam dan merah. Hal ini dikarenakan penggunaan input baik secara domestik maupun asing pada harga sosial lebih rendah dari pada input pada harga privat. Artinya petani masih memperoleh biaya input lebih tinggi dari yang seharusnya dibayarkan. Namun pada usaha tani beras putih berbeda dengan kedua jenis beras organik. Keuntungan sosial lebih kecil dari keuntungan privat pada beras putih. Hal ini dikarenakan harga jual beras putih organik lebih tinggi dari harga sosialnya.

Selain keuntungan, perlu juga dilihat dari sisi keunggulan yang dimiliki. Jika dibandingkan nilai DRC dan PCR pada usaha tani beras organik ini diketahui bahwa nilai PCR beras hitam dan beras merah lebih rendah dibandingkan dengan nilai DRC nya. Artinya bahwa keunggulan kompetitif lebih rendah dibandingkan dengan keunggulan komparatif. Penerimaan secara privat pada beras hitam dan merah memiliki kemampuan lebih rendah dibandingkan secara sosial dalam memenuhi kebutuhan input domestiknya. Hal ini dikarenakan harga jual diterima petani lebih rendah dari harga sosialnya. Hasil analisis daya saing ini tidak berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya pada usaha penggemukan sapi potong, yang menunjukkan pula nilai DRC lebih tinggi dari PCR (Rouf *et al.* 2014) dan penelitian analisis pendapatan usaha tani beras dengan SRI yang dilakukan oleh Mulyaningsih (2010) bahwa usaha tani beras dengan SRI memberikan

keuntungan secara finansial. Namun berbeda dengan hal tersebut adalah beras organik putih, yang menunjukkan nilai PCR lebih tinggi dari nilai DRC. Artinya, beras organik putih memiliki keunggulan komparatif lebih tinggi dari dari keunggulan kompetitif. Hal ini dikarenakan harga jual beras putih lebih tinggi dengan harga sosialnya.

Dampak kebijakan pemerintah dianalisis dengan pengamatan pada tiga aspek berikut.

1. Dampak kebijakan terhadap output
Indikator dampak kebijakan pemerintah terhadap output dapat dilihat dengan menggunakan nilai TO (*Transfer Output*) dan NPCO (*Nominal Protection Coefficient on Output*). Nilai transfer Output pada beras merah sebesar Rp. 1.772.890.39,- hektar, beras hitam Rp. 5.337.893.86,-per hektar dan beras putih Rp. 8.447.279.97,-per hektar. Begitu juga nilai NPCO lebih besar dari 1. (Lihat Tabel 4).

Tabel 4. Nilai *Transfer Output* (TO) dan *Nominal Protection Coefficient on Output* (NPCO) Pengusahaan Beras Organik di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015

No	Varietas Beras	TO (Rp/Ha)	NPCO
1	Beras Merah Organik	1.772.890,39	1,09
2	Beras Hitam Organik	5.337.893,86	1,36
3	Beras Putih Organik	8.447.279,97	1,64

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Nilai transfer output bersifat positif. Artinya, harga privat lebih tinggi dari harga sosialnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan atau intervensi pemerintah pada output usaha tani beras organik menguntungkan produsen. Dengan kata lain, pengalihan surplus terjadi, dari konsumen ke produsen. Nilai transfer output lebih besar dari 0 dan NPCO lebih besar dari 1 mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah menyebabkan harga output ditingkat petani lebih tinggi dari harga sosial. Kebijakan pemerintah pada output beras organik yaitu Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 yang menegaskan penjualan yang harus melalui badan usaha menyebabkan petani memiliki kesulitan dalam kegiatan

ekspor. Namun hal ini dapat diantisipasi melalui kerjasama dengan pihak distributor PT Bloom Agro. Pasar yang dihadapi petani bersifat monopsoni dimana hanya PT Bloom Agro yang melakukan pembelian ke petani di Kabupaten Tasikmalaya. Sebaliknya, kebijakan pemerintah pada sertifikasi organik dalam Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 berakibat harga jual beras organik lebih tinggi dari harga jual beras non organik.

2. Dampak Kebijakan Terhadap Input
Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat intervensi pemerintah terhadap input produksi adalah nilai *transfer input* (TI), Transfer Faktor dan koefisien proteksi nominal pada input (NPCI) dari ketiga varietas beras organik (lihat Tabel 5).

Tabel 5. Nilai Transfer Input (TI), Transfer Faktor (TF), dan *Nominal Protection Coeficient on Input* (NPCI) Pengusahaan Beras Organik di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015

No	Varietas Beras	TI (Rp/Ha)	NPCI	TF (Rp/Ha)
1	Beras Merah Organik	1.772.890,39	1,09	1.459.625,98
2	Beras Hitam Organik	1.196.072,08	1,60	3.859.614,79
3	Beras Putih Organik	545.261,56	1,16	6.259.864,82

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Pada ketiga varietas beras organik nilai TI bersifat positif. Ini berarti bahwa harga sosial input asing lebih rendah dari harga input asing privat sehingga produsen beras merah, beras hitam, dan beras putih organik harus membayar input lebih tinggi dari yang seharusnya dibayarkan. Ketiga varietas tidak memperoleh subsidi pada input tradable sehingga semua biaya input tradable ditanggung oleh petani. Tidak adanya subsidi pada benih beras organik sehingga harga beli petani lebih tinggi dari harga sosialnya. Kebijakan subsidi input nomor 130/Permentan/SR/11/2015 hanya terdapat pada pupuk organik dan tidak sampai ke petani, sehingga petani, termasuk juga petani di Kabupaten Tasikmalaya, menerima harga melebihi nilai HET nya.

Nilai NPCI ketiga varietas beras organik Gapoktan Simpatik memiliki nilai yang sama di atas satu. Hal ini menunjukkan terdapat proteksi bagi produsen beras merah, hitam, dan putih terhadap *input tradable*, dan ini menyebabkan harga input produksi tinggi. Nilai TF pada ketiga komoditas

beras organik yang bersifat positif menggambarkan bahwa harga input *non tradable* pada harga finansial lebih tinggi dibandingkan dengan input *non tradable* pada harga sosial. Produsen beras hitam, merah, dan putih organik harus membayar input *non tradable* lebih tinggi dari yang seharusnya dibayarkan. Mereka mengalami kerugian sebesar Rp. 1.459.625,98,- per hektar pada pengusahaan merah organik, Rp. 3.859.614,79,- per hektar pada beras hitam dan Rp. 6.259.864,82,- per hektar pada beras putih organik. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah nomor 70/Permentan/SR.140/2011 tentang pupuk organik, pupuk hayati dan pembenahan tanah menyebabkan biaya lahan lebih tinggi dari yang seharusnya akibat adanya sertifikasi lahan.

3. Dampak Kebijakan Terhadap Input Output

Dampak kebijakan terhadap input output dapat dilihat dari nilai TB, EPC, SRP. TB, dan PC sebagai indikator bagaimana kebijakan pemerintah terhadap output dan input.

Tabel 6. Nilai TB, EPC, SRP, dan PC untuk Komoditas Beras Organik

No	Varietas Beras	TB (Rp/Ha)	EPC	SRP	PC
1	Beras Merah Organik	(3.042.325,36)	1.02	(0.17)	0.42
2	Beras Hitam Organik	282.206,99	1.32	0.02	1.08
3	Beras Putih Organik	1.642.153,59	1.82	0.13	5.17

Sumber : Hasil Pengamatan (2015)

Kebijakan pemerintah berdampak berbeda atas ketiga beras organik. Nilai transfer bersih beras hitam dan putih bersifat positif sedangkan nilai transfer bersih beras merah bersifat negatif. Dampak positif untuk beras hitam dan putih dikarenakan oleh penerimaan secara privat melebihi penerimaan secara sosial. Nilai transfer bersih yang negatif usaha tani beras organik di Kabupaten Tasikmalaya berarti bahwa petani menanggung kerugian, yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input dan output. Kebijakan tersebut menyebabkan petani beras merah mendapatkan keuntungan privat yang lebih kecil dibandingkan dengan harga pasar. Pada analisis indikator dampak kebijakan output sebelumnya, nilai transfer yang positif petani beras merah mendapatkan harga beras merah yang lebih mahal dari harga sosialnya. Namun kebijakan input dan output yang diterapkan oleh pemerintah membuat keuntungan petani pada harga privat menjadi lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan sosialnya. Dengan demikian, kebijakan input dan output belum memberikan insentif kepada petani beras merah. Diantaranya disebabkan oleh kenaikan harga jual ekspor beras merah kurang sesuai dengan biaya tinggi yang

dikeluarkan untuk kemasan. Selain itu, pupuk organik yang tinggi merupakan biaya terbesar kedua yang dikeluarkan setelah biaya kemasan. Hal ini selaras dengan penelitian Sarianti (2012) bahwa harga pupuk organik masih tinggi digunakan petani beras organik di Ciburuy Sukabumi. Kebijakan yang ada dirasa belum mampu memberikan keuntungan bagi petani beras merah organik. Dilihat dari nilai indikator EPC yang lebih dari satu mengindikasikan bahwa kebijakan input dan output yang diterapkan pada usaha tani beras organik pada input asing di Kabupaten Tasikmalaya bersifat efektif. Hal ini disebabkan oleh harga input asing yang dibayar petani sesuai dengan harga jual beras organik.

Ada dan tidaknya dukungan pemerintah terhadap usaha tani beras organik ditunjukkan oleh nilai *Profitability Coefisien* (PC) dan *Subsidy Ratio Produsen* (SRP). Nilai PC merupakan rasio antara keuntungan privat dengan keuntungan sosial. Jika nilai PC beras merah organik sebesar 0,42, berarti bahwa kebijakan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah belum sepenuhnya memberikan dukungan bagi usaha tani beras merah. Hal ini sama dengan kebijakan terhadap komoditi kelapa di Kupang (Krisna,

2014). Berikutnya, apabila nilai rasio subsidi produsen (SRP) negatif pada beras merah menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang dilakukan selama ini menyebabkan petani beras merah harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sosial yang seharusnya dikeluarkan. Hal ini sangat berbeda dengan nilai SRP pada beras hitam dan putih dimana kebijakan pemerintah dirasa memberikan dukungan pada usaha tani beras hitam dan putih. Begitu juga pada kebijakan pemerintah terhadap impor daging sapi Australia yang membatasi kuota impor (Efrida, 2014).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pengusahaan beras merah, beras hitam, dan beras putih organik di Kabupaten Tasikmalaya memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Bahkan kebijakan pemerintah yang telah diterapkan secara keseluruhan berdampak positif bagi keuntungan petani. Berdampak negatif hanya terdapat pada penyediaan input seperti pupuk dan benih organik. Pengusahaan ketiga komoditi tersebut memberikan keuntungan baik secara finansial dan ekonomi. Kebijakan pemerintah terhadap input dan output secara keseluruhan berdampak yang menguntungkan kepada produsen. Dengan kata lain, kebijakan yang ada terhadap input output bersifat melindungi produsen dalam negeri.

Dengan demikian, kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan ekspor

beras organik adalah pembentukan lembaga khusus yang menangani penyediaan input organik, sehingga dengan demikian petani lebih mudah memperoleh input yang diperlukan. Pembinaan, pelatihan, dan penerangan kepada petani perlu terus dilakukan bahwa prospek mengusahakan beras organik sangat menjanjikan. Selain itu juga diperlukan pembinaan lanjutan bagaimana strategi pengembangan usaha tani beras organik dan rantai pasar produk yang dihasilkan pada pasar domestik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari yang telah memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan naskah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, R., N. Ardiyasa. (2010). Analisis Tingkat Daya Saing Ekspor Komoditi Perkebunan Indonesia. *Jurnal Agricultural Socio Economics (AGRISE)*, Vol. VIII (2).
- BPS. (2014). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi* Edisi 52. Di unduh pada tanggal 23 Maret 2015 dari www.bps.go.id.
- Efrida, R.P. (2014). Dampak Kebijakan Indonesia Membatasi Kuota Impor Daging Sapi dari Australia. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.1 (2).

- Gittinger, J.P. (1986). *Economic Analysis of Agricultural Projects*. Second Edition. Baltimore Johns Hopkin University Press.
- IFOAM. (2014). Organic Agriculture Worldwide “Global Data and Survey Background”. Journal : Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) : Frick. Switzerland.
- Kaunang, W.R. (2013). Daya Saing Ekspor Komoditi Kelapa Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi* (EMBA), Vol. 1 (4).
- Kementan. (2015). Perkembangan Beras Organik Tasikmalaya 2005-2012. Tasikmalaya. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tasikmalaya.
- Krisna. (2014). Analisis Daya Saing Komoditas Kelapa Di Kabupaten Kupang. *Jurnal : AGRITECH*, Vol. 34 (1).
- Krugman, P.R., & Obstfeld, M. (2004). *Ekonomi Internasional “Teori dan Kebijakan”* Edisi Kelima. Gramedia. Jakarta
- Mayrowani, H. (2014). Pengembangan Pertanian Organik. *Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 30 (2), pp. 91-108.
- Monke, E.A., & S. R. Pearson. (1989). *The Policy Analysis Matrix for Agricultural Development*. London. Cornell University Press.
- Mulyaningsih, A. (2010). Analisis Pendapatan Usahatani Beras Organik Metode SRI (*Sistem of Rice Intensification*); Studi Kasus Desa Cipeuyeum, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Nafis, F. (2011). Analisis Usahatani Padi Organik dan Sistem Tataniaga Beras Organik di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Rouf, A.A., Daryanto, A & Fariyanti A. (2014). Daya Saing Usaha Sapi Potong di Indonesia: Pendekatan Domestic Resources Cost. *Jurnal WARTAZOA*, Vol. 24 (2), pp. 97-107
- Salim, H.P. (2014). Efisiensi dan Daya Saing Sistem Usahatani Beberapa Komoditas Unggulan Hortikultura. *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Sarianti, T. (2012). *Analisis Faktor dan Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Beras Organik serta Analisis Pendapatan dan Risiko Produksi Padi Organik*. Prosiding Seminar Penelitian Unggulan Departemen Agribisnis. 27-28 Desember 2012. Bogor.
- Soetrisno. (2010). *Analisis Daya Saing Agribisnis Kopi Robusta. Sebuah Prespektif Ekonomi*. Malang. Surya Pena Gemilang.
- Willer, H. (2010). Organic Agriculture Worldwide. Key Results from the Global Survey On Organic. *Journal Research Institut of Organic Agriculture FiBL and IFOAM*, Frick, Switzerland. March 2012. Sciencedirect.com

Yadjid, M. (2011). *Analisis Daya Saing Usahatani Tebu dan Penyesuaian Struktural Industri Gula di Jawa Barat.*

Tesis. Bogor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.